

EFEKTIVITAS APLIKASI PAJAK ONLINE KOTA SUKABUMI (PANTAS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUKABUMI

Siti Syadzalia Azmila¹, Awan Setiawan², Ade Sudrajat³

Email : syadzalias21@gmail.com¹, awan2425@gmail.com², sudrajatade099@gmail.com³

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

^{2,3}Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard Matland.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan efektivitas aplikasi pajka online di Kota Sukabumi.

Hasil dari penelitian sementara ini ditemukan bahwa Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Sukabumi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini ditinjau dari 5 pendekatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan yaitu sasaran Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, Tepat Proses pelaksanaan Aplikasi Pajak Online (PANTTAS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Efektivitas, Upaya meningkatkan Pajak Asli Daerah, PANTAS.

ABSTRACT

The Effectiveness of the Sukabumi City Online Tax Application (PANTAS) in Efforts to Increase Sukabumi City's Own-Source Revenue

This research aims to analyze the effectiveness of the Sukabumi City Online Tax Application (PANTAS) in increasing the city's own-source revenue. In analyzing the identified issues, the researcher uses the theory proposed by Richard Matland.

The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation related to the effectiveness of the online tax application in Sukabumi City.

The preliminary findings of this research show that the effectiveness of the Sukabumi City Online Tax Application (PANTAS) in efforts to increase the city's own-source revenue has generally been running well and optimally. This is assessed through five approaches that serve as benchmarks of success, namely: Precision of Policy Objectives, Precision of Implementation, Precision of Targeting, Precision of Environmental Fit, and Precision of Application Process. The Online Tax Application (PANTAS) and the Sukabumi City Financial Management and Revenue Agency have carried out their duties and authorities in accordance with their respective main tasks and functions.

Keywords: *Effectiveness, Efforts to Increase Local Own-Source Revenue, PANTAS.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola secara mandiri oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut PAD merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. PAD sangat penting karena menjadi salah satu indikator kemandirian keuangan daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih optimal. Dengan berlakunya konsep Otonomi daerah di Kota Sukabumi yang merupakan pemberian wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memberikan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan responsif. Kewenangan pengelolaan keuangan yang diberikan kepada daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Dengan berkembangnya otonomi daerah menjadikan konsekuensi dari reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi. Untuk

melaksanakan otonomi daerah, pemerintah Kota Sukabumi harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat bagian yang menjelaskan dan menegaskan aturan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah. Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak dan berkewajiban untuk melakukan serangkaian upaya dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah terutama dengan yang berkaitan pada pelaksanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian daerah adalah kondisi ketika proses penyelenggaraan pembiayaan urusan pemerintahan suatu daerah dilakukan secara mandiri dengan sumber pendanaan yang berupa Pendapatan Asli Daerah.

Kota Sukabumi di tuntut untuk mandiri terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan PAD, kontribusi PAD (own Revenues) dalam APBD (Local Government Budget) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pengelenggara otonomo daerag. otonomi daerah tentunya memiliki tujuan baik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan

Asli Daerah diatur sebagai terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam Bidang Pemerintahan sudah menjadi tuntutan. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dan mendukung program pemerintah pusat berbasis teknologi (E Government), hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur tentang pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini pemerintah Kota Sukabumi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah membangun suatu system aplikasi pelaporan dan pembayaran pajak secara online melalui Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) yang terdiri dari pengelolaan pajak restoran, Hotel, Parkir, Hiburan, Reklame, dan Air Tanah, PPJ.

Berdasarkan peraturan Walikota No 22 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah yang kini telah di perbarui menjadi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPKPD telah mempersiapkan sarana prasarana berupa sistem PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kota Sukabumi secara professional, efektif, efisien dalam pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas pembayaran pajak dimana sistem pembayaran terkoneksi dengan Bank Persepsi, jaringan telekomunikasi maupun sarana penunjang lainnya bagi wajib pajak yang dapat di unggah pada laman <https://pantas.sukabumikota.go.id/login>. Website ini diharapkan menjadi inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pembayaran

pajak secara online yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan akurat.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan efektivitas aplikasi pajak online di Kota Sukabumi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian mengenai *Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS)* menunjukkan bahwa implementasi aplikasi telah membawa perubahan signifikan dalam proses administrasi perpajakan daerah. Temuan disajikan berdasarkan tiga fokus penelitian: efektivitas aplikasi, hambatan, serta upaya optimalisasi.

Efektivitas Aplikasi PANTAS dalam Meningkatkan PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PANTAS telah berjalan dengan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak daerah.

- a) Aplikasi mencakup proses perpajakan dari pendaftaran, penetapan, pengelolaan piutang, hingga pelaporan yang sesuai SOP BPKPD. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan pejabat BPKPD yang menyatakan bahwa alur PANTAS telah sesuai SOP dan berjalan sistematis.

- b) Wajib pajak menilai bahwa sistem mempermudah pembayaran dan mengurangi potensi transaksi manual yang rentan terhadap kesalahan atau kebocoran pajak.
- c) Secara keseluruhan, implementasi menunjukkan peningkatan transparansi dan efisiensi administrasi pajak daerah.

Temuan ini diperkuat oleh data wawancara yang menunjukkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan kemudahan akses pembayaran.

Hambatan dalam Efektivitas PANTAS

Meskipun menunjukkan efektivitas yang baik, beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain:

- a) Rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
- b) Kurangnya sosialisasi, terutama bagi sektor informal yang belum familiar dengan penggunaan teknologi digital.
- c) Kendala teknis aplikasi, seperti notifikasi otomatis yang belum optimal, tampilan antarmuka yang perlu lebih user-friendly, serta kebingungan pada tahap input data.
- d) Keterbatasan SDM BPKPD, terutama dalam proses verifikasi data ketika jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, infrastruktur, serta edukasi publik.

Upaya untuk Mengatasi Hambatan

BPKPD Kota Sukabumi telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas aplikasi, meliputi:

- a) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, seperti integrasi dengan sistem perbankan, peningkatan

channel pembayaran, dan penguatan infrastruktur.

- b) Sosialisasi dan pelatihan intensif, termasuk pendampingan langsung bagi pelaku usaha sektor informal yang kurang akrab dengan teknologi.
- c) Penambahan SDM, sebagai upaya mempercepat proses verifikasi dan pelayanan pajak.
- d) Pemberian insentif bagi wajib pajak patuh, untuk meningkatkan motivasi penggunaan aplikasi.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Matland (dalam Nugroho, 2017), yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.

Tepat Kebijakan

Kebijakan PANTAS dinilai tepat karena:

- a) Sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan daerah yang membutuhkan transparansi dan efisiensi.
- b) Tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.
- c) BPKPD memiliki kewenangan penuh dalam implementasinya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan pejabat BPKPD bahwa aplikasi berada pada koridor kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan aturan lain.

Tepat Pelaksanaan

Pelaksanaan PANTAS sudah mengikuti SOP BPKPD, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara bahwa seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga pelaporan telah berjalan sesuai standar. Namun, beberapa kendala teknis seperti error sistem dan respon petugas yang lambat menunjukkan perlunya peningkatan stabilitas layanan dan kesiapan SDM.

Tepat Target

Aplikasi telah menjangkau sebagian besar wajib pajak, terutama sektor formal. Namun sektor informal masih menjadi tantangan karena keterbatasan kemampuan teknologi dan kurangnya sosialisasi. Artinya, implementasi sudah tepat target tetapi perlu perluasan inklusi digital.

Tepat Lingkungan

Lingkungan internal dan eksternal memberikan pengaruh positif bagi implementasi PANTAS:

- a) Wajib pajak merasakan kemudahan pembayaran.
- b) Pelayanan BPKPD menjadi lebih efektif.
Namun rendahnya literasi digital di masyarakat menjadi hambatan utama.

Tepat Proses

Proses operasional aplikasi dinilai sudah sistematis dan berjalan sesuai SOP, termasuk pendaftaran, penetapan, hingga pengelolaan piutang. Namun perlu penyederhanaan alur aplikasi dan pelatihan penggunaan aplikasi bagi wajib pajak, terutama terkait input data dan navigasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Efektivitas Aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS)* dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. **Efektivitas PANTAS dalam meningkatkan PAD menunjukkan hasil yang positif.** Aplikasi mampu memberikan kemudahan akses, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung transparansi pengelolaan pajak daerah. PANTAS juga telah

berjalan sesuai SOP dan mencakup seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan. Temuan ini sejalan dengan pernyataan pejabat BPKPD dan respons wajib pajak yang menyebutkan peningkatan efisiensi layanan.

2. **Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan aplikasi.** Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, sosialisasi yang belum merata khususnya bagi sektor informal, kendala teknis sistem seperti fitur notifikasi dan antarmuka yang belum optimal, serta keterbatasan SDM BPKPD dalam proses verifikasi dan pelayanan.

3. **Upaya peningkatan efektivitas telah dilakukan, tetapi perlu diperkuat.** Langkah-langkah seperti penyempurnaan aplikasi, pelatihan dan pendampingan wajib pajak, penambahan SDM, serta pemberian insentif terbukti menjadi strategi awal yang relevan. Namun implementasi perlu dijalankan secara lebih intensif dan terstruktur agar potensi peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan.

Secara keseluruhan, efektivitas PANTAS sudah berjalan baik namun belum optimal dan membutuhkan penguatan pada aspek teknis, sumber daya, dan edukasi masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif, tetapi keberhasilan penuh sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dan kapasitas pemerintah daerah.

SARAN

Berangkat dari temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan literasi digital masyarakat dan wajib pajak.** Pemerintah daerah perlu memperluas sosialisasi dan edukasi melalui pelatihan langsung, workshop, coaching clinic, dan video panduan agar semua kalangan—terutama sektor informal—lebih memahami cara menggunakan PANTAS.
2. **Mengoptimalkan fitur dan stabilitas aplikasi.** Peningkatan antarmuka agar lebih user-friendly, perbaikan fitur notifikasi otomatis, serta peningkatan kecepatan dan stabilitas sistem perlu dilakukan secara berkala sesuai masukan wajib pajak.
3. **Menambah dan meningkatkan kapasitas SDM BPKPD.** Penambahan jumlah petugas, peningkatan pelatihan internal, serta pembagian tugas yang lebih proporsional akan mempercepat proses verifikasi dan pelayanan perpajakan.
4. **Memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal.** Kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, serta instansi pemerintah lain dapat memperkaya integrasi sistem, menambah kanal pembayaran, dan meningkatkan efisiensi proses.
5. **Memberikan insentif kepada wajib pajak patuh.** Insentif berupa potongan administrasi, prioritas layanan, atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menggunakan PANTAS secara rutin.
6. **Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi aplikasi.** Pemerintah perlu memantau kendala, menampung umpan balik pengguna, dan memperbarui SOP agar implementasi PANTAS sesuai

kebutuhan lapangan dan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, (2013), *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Hariyanto, Eri.(2017). *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit Gay Media.
- Tika ,Moh. Pabundu. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Priansa, Donni Juni. dan Garnida, Agus. (2013). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moleong, Lexy J.(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodaskara Offset.
- Kencana, Inu Syafiie. (2010) *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D.(2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Persada Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Suryabrata, Sumandi.(2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.

- Ridwan, HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Press,
- Pasolong, Dr. Harbani. (2021). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Pasolong, Harbani. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta, CV
- Mustanir, Ahmad dkk. (2022) *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Purbalingga. Eureka Media Aksara.
- Siagian Sondang P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Richard M. Steers, Magdalena Jamin. 2010. *Effectivitas Organisasi : (Kaidah Tingkah Laku)*. Jakarta, Erlangga,
- Nugroho, Riant. 2017. *Public policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building. Jakarta
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabarguna, Boy. 2005. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Satori, Djam'an. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. 2015. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Budiarjo Miriam. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Talizidhuhu Ndraha, Kybernology I. (2003). *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Labolo Muhadam. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Kelapa Gading Permai.
- Rasyid Riyaas. (2002). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widia.
- Mahfud Moch, M.D. (2000) *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soematri Sri. (2006). *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI" dalam Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Novilasari Affiani. (2023). Efektivitas Penerapan Online System SIPANJI dan SIMONI dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang). Tesis. Universitas Brawijaya.
- Feliana Rizky (2024). Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Center). Tesis. Universitas Bakrie.

- Yoga Pratama Dandy. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Online Di Kabupaten Malang (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang). Tesis. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Permatasari Mila. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah.
- Wulanda Eldiya. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X. Tesis. Politeknik Negeri Jakarta.
- Ningrat Bayu Surya . (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta . Rineka Cipta.
- Dwiningwarni, S. S., Suharsono, J., & Dedy Eko TS, M. (2019). Peningkatan Pendapatan asli Daerah Melalui Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Pasar. *eBA Journal: Journal Economics, Business and Accounting*, 5(1), 71–83. <https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.714>
- Faradiba, S., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021b). Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.649>
- Faradiba, S., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021b). Efektifitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.649>
- Tuheteru, N. R., Musfitria, A., & Yuliawan, E. (2022). Analisis Efektivitas Pada Pengelolaan Kas Dana Bantuan operasional Sekolah Di Mi at-taqwa cijeruk. *EIMal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 402–423. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i3.900>.
- Aprilia Santy Nurina, Wijaya Andy Fefta, Suryadi. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). *Wacana_ (17)*3.
- Abid Muhtarom. (2015). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Edisi Maret*, (13). 1.660
- Kurniasari, Rizki. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, (10).3.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun (2011), (Jakarta: Mitra Wacana Media, 383.
- Putro, Adi Febry. As'ari Hasim. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Covid-19 Tahun 2010-2022 di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. (1) 2.347-352.
- Nooraini, Afni. Yahya, Alif Syarifudin. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JE &*

KP Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 89
– 104.

Firmansyah Riza, Sumanti Agus (2021).
Evaluasi penerapan pajak daerah
online menggunakan aplikasi e-PAD
terhadap penerimaan pajak daerah
Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan
Pendidikan.1 (7) 686-696.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU
No. 25 Tahun 1999 tentang Kebijakan
Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal
186 ayat 1 tentang Pemerintahan
Daerah mengenai Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Pemerataan Fiskal Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pendapatan Daerah

Pasal 1 Ayat 18 UU 33 Tahun 2004 tentang
PAD

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 37
Tahun 2018 tentang Pembayaran dan
Pelaporan Transaksi Pajak Online.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.